

Dua Kasat dan Kapolsek Tingkir Diganti

SALATIGA (KR) - Kapolres Salatiga AKBP Feria Kurniawan memimpin serah terima jabatan (sertijab) tiga pejabat utama di Polres Salatiga, yakni Kasat Res Narkoba, Kasat Samapta dan Kapolsek Tingkir, Rabu (15/2). Kapolsek Tingkir Polres Salatiga kini dijabat AKP Joko Widodo yang sebelumnya menjabat Kapolsek Selo Polres Boyolali. Kemudian Kasat Resnarkoba Polres Salatiga kini dijabat AKP Asikin yang sebelumnya Kasat Samapta Polres Salatiga. Sedangkan AKP Wikan S yang sebelumnya sebagai Kasat Resnarkoba Polres Salatiga pindah tugas sebagai Kasat Reskrim Polres Sragen. Sedangkan Kasat Samapta Polres Salatiga dijabat oleh Iptu Samino yang sebelumnya KBO Satlantas Polres Salatiga.

Kapolres Salatiga AKBP Feria Kurniawan mengatakan mutasi dan pindah jabatan hal yang biasa dalam sebuah organisasi dan sebagai upaya mendinamisasikan organisasi. Selain itu juga merupakan penyesaran yang harus dilakukan secara kontinyu agar kinerja Polri tetap terjaga dalam memberikan, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. "Selamat menjalankan tugas. Kepada pejabat baru teruskan ide atau pikiran kreatif yang telah dibuat oleh pejabat lama, lanjutkan dan pertahankan misi dan capaian positif dari pejabat lama," kata AKBP Feria Kurniawan. **(Sus)-f**

Bawaslu Luncurkan Aplikasi Pengawasan

WONOGIRI (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri Toto Sihsetyo Adi mengatakan pihaknya kini mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup lengkap untuk melaksanakan tugas-tugas teknis Pemilu 2024. "Rekrutmen badan adhoc sudah selesai. Kami sudah punya PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih," ungkapnya, Selasa (14/2), usai menggelar nonton bareng Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU Wonogiri. Disebutkan, kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonogiri 2024 mendatang Rp 66 miliar. Sekitar 40 persen atau Rp 30 miliar di antaranya untuk honor badan adhoc. "Rp 30 miliar itu hanya untuk honor badan adhoc. Belum termasuk operasional di PPK, PPS, KPPS dan TPS. Belum termasuk logistik," tandasnya.

Neburutnya, anggaran gaji badan adhoc sangat besar karena harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Honor badan adhoc untuk Pemilu 2024 mendatang meningkat dibandingkan dengan Pilkada 2020. Untuk Pilkada 2024, kebutuhan anggaran dipenuhi APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. "Kami berharap, kebutuhan biaya untuk badan adhoc ditanggung oleh APBD Provinsi sehingga APBD Kabupaten hanya mengalokasikan Rp 23 miliar," ungkap Toto Sihsetyo. Selasa lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri juga meluncurkan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan Posko Kawal Hak Pilih, Siaga Pengawasan Pemilu. **(Dsh)-f**

Puluhan Napi Narkoba Jalani Tes Urine

SALATIGA (KR) - Puluhan nara pidana (napi) di Rutan Klas II B Salatiga menjalani tes urine dadakan, Kamis (16/2). Langkah ini dilakukan pihak rutan untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba dan barang terlarang di dalam tahanan. Kepala Rutan Salatiga Andri Lesmano yang memimpin kegiatan ini mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi adanya peredaran dan penggunaan narkoba pada warga binaan, jajaran petugas keamanan dan ketertiban lakukan razia serta tes urine secara acak. "Kami melakukan tes urine dadakan dan razia kepada napi atau warga binaan masyarakatan sebanyak 80 orang perkara narkoba," kata Andri Lesmano. Ditegaskannya, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terus digelarakan Rutan Salatiga, selain razia rutin termasuk yang dilakukan pada Rabu (15/2) malam, dilanjutkan Kamis (16/2) pendekatan personal, melalui sosialisasi ataupun penyuluhan hingga tes urine untuk memastikan Rutan Salatiga 'NIHIL' dari Narkoba.

Tidak hanya itu Rutan Salatiga juga menggandeng jajaran kepolisian dan Yayasan GERAM memberikan penyuluhan, pendampingan serta pelatihan agar warga binaan dapat hidup sehat terampil, produktif dan bermanfaat saat bebas nanti. Sehingga hal tersebut menjadi bekal penting saat mereka bebas. Kegiatan razia dan tes urine ini menjadi langkah penting mensukseskan program Presiden Jokowi Perang Melawan Narkoba serta perintah Dirjen Pemasarakatan terkait 3 kunci masyarakatan maju melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, bersinergi dengan aparat penegak hukum lain dan penerapan 'back to basic'. **(Sus)-f**

Polines Gelar Electro Expo and Competition

SEMARANG (KR) - Direktur Politeknik Negeri Semarang (Polines) Prof Dr Totok Prasetyo BEng MT IPU ACEP bersama para wakil direktur serta Ketua Jurusan Teknik Elektro Yusnan Badruzzaman ST MEng membuka "Electro Expo and Competition Polines 2023" Kamis (16/2). Kegiatan expo ini sudah rutin dilaksanakan sejak 2015 meski awalnya bentuknya dulu expo karya tugas akhir mahasiswa dan digelar di berbagai mall yang ada di kota Semarang. Kemudian saat Pandemic covid-19, kegiatan dilaksanakan secara on-line.

"Sekarang dengan konsep baru, dilaksanakan di kampus untuk wahana memperkenalkan kampus. Konsep baru ini pula ditambah dengan berbagai lomba antar mahasiswa elektro se Indonesia serta Bazaar" ujar Direktur Polines. Senada, Ketua Jurusan Teknik Elektro Yusnan Badruzzaman ST MEng dan Ketua Panitia Kegiatan Dr Amin Suharjono ST MT menyampaikan ajang ini juga ajang melatih pengembangan hard skill dan soft skill. Mahasiswa berlatih soft skill, berlatih kolaborasi, kepemimpinan dan lain lain. **(Sgi)-f**



KR-Sugeng Irianto

Direktur, para wakil direktur, ketua jurusan, dan ketua panitia saat meninjau expo.

Bawaslu Purworejo Gencarkan Pengawasan Partisipatif

PURWOREJO (KR) - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Purworejo menduduki peringkat tertinggi ketiga di Jateng. Untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Purworejo menggencarkan pola pengawasan partisipatif. PLH Ketua Bawaslu Purworejo Abdul Aziz mengatakan, pengawasan pemilu di Purworejo tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu. "Pengawasan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk seluruh elemen masyarakat," ujarnya, Kamis (16/2).

Menurutnya, dukungan masyarakat penting dalam upaya penegakan fungsi dan kewenangan bawaslu yang diberikan oleh undang-undang. Partisipasi masyarakat, katanya, tidak hanya dibutuhkan pada saat memberikan suara di TPS. Namun, lanjutnya, kegiatan pengawasan partisipatif harus dimulai sejak tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, sampai perhitungan suara. "Harus dikawal bersama, kita awasi bersama," tegasnya.

Dijelaskan, partisipasi pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Media sosial, lanjutnya, akan menjadi salah satu elemen penting dalam Pemilu Serentak 2024, mulai sosialisasi oleh penyelenggara hingga ajang kampanye para peserta. "Masyarakat dapat melakukan pengawasan di media sosial, misalnya hoaks, dan pelanggaran netralitas aparaturnegara," ujarnya.

Wujud nyata upaya menggencarkan pengawasan partisipatif, katanya, dilakukan dengan menggelar Apel Siaga Pengawasan di halaman Kantor Bawaslu Purworejo. Apel yang digelar satu tahun jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu dihadiri jajaran Pemkab Purworejo, KPU, unsur penegak hukum, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pelajar. "Bawaslu juga merilis komunitas digital pengawasan partisipatif, gerakan Jarimu Awasi Pemilu, posko kawal hak pilih, dan deklarasi pemilu damai dan berintegritas," terangnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Purworejo, Anik Ratnawati menambahkan, IKP yang telah dirilis oleh Bawaslu RI menunjukkan Kabupaten Purworejo masuk dalam kategori rawan tinggi. "Purworejo memiliki indeks kerawanan 67,11

persen," ucapnya. Dijelaskan, IKP Kabupaten Purworejo menduduki peringkat 18 secara nasional. Peringkat kerawanan pelaksanaan pemilu di Purworejo untuk Jawa Tengah, juga naik dari 18 sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi tiga. **(Jas)-f**



KR-Sri Warsiti

Kapolres Klaten didampingi Ketua Bhayangkari, memotong tumpeng.

Kepala Daerah Diminta Kembangkan Potensi Unggulan

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta kepada semua kepala daerah di Jawa Tengah, serius mengembangkan potensi unggulan di masing-masing daerah. Selain berpengaruh pada ekonomi, langkah tersebut juga akan berdampak pada investasi serta pariwisata.

Ganjar Pranowo mengatakan hal tersebut usai menghadiri dan membuka High Level Meeting Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah (Keris Jateng), di Semarang Kamis (16/2). Kegiatan ini diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia Jateng.

"Menurut saya ini penting, karena kami ditugasi oleh Pak Pre-

siden agar seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota, berlomba-lomba melakukan perbaikan ekonomi, mencari terobosan agar kemudian kita tidak terpukul," tegas Ganjar.

Ada tiga hal yang disampaikan Ganjar dalam forum tersebut. Pertama terkait dengan investasi. Ganjar menegaskan agar seluruh daerah punya komitmen yang sa-

ma, yaitu mudahkan investasi. Ini harus menjadi komitmen semuanya dan tidak bisa menunggu, tapi mencari. Daerah bisa mulai mencari pasar dengan potensial menggandeng banyak pihak, termasuk level nasional dengan mengajak serta duta besar.

"Para duta besar sebenarnya mereka juga sangat progresif. Ajak mereka bicara, mana daerah-daerah di wilayah kabupaten-kota yang memang potensial untuk membuka ruang investasi masuk," tutur Ganjar.

Selain itu, Ganjar tidak menutup mata pada potensi korupsi pada proses pelayanan investasi. Untuk itu Ganjar minta agar ti-

dak ada biaya tinggi, dan integritasnya dijaga. Jangan ada yang mempersulit apalagi kalau punya kepentingan interest pribadi.

Ganjar berpesan agar UMKM terus didorong untuk berkembang. Gubernur Jateng dua periode itu mengatakan, saat ini adalah kesempatan UMKM naik kelas.

Apalagi, Bank Indonesia juga beberapa kali turut serta membantu, seperti program Learning Centre Bawang Putih di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal. Ganjar berharap UMKM di sektor pertanian bisa lebih berkembang lagi agar Jawa Tengah bisa melambungkan dari sisi ekonomi. **(Bdi)-f**

PURWOREJO EXPO 2023 BANGKITKAN SEKTOR RIIL
BOB Angkat Potensi Wisata dan Ekraf Lokal

PURWOREJO (KR) - Badan Otoritatif Borobudur (BOB) mengangkat potensi wisata dan ekonomi kreatif (ekraf) lokal. Upaya tersebut dilakukan untuk membangkitkan

sektor riil yang terpuruk akibat pandemi tiga tahun lalu. Salah satu terobosan yang dilakukan pihak BOB adalah membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah. "Salah sa-



KR-Jarot Sarwosambodo

Purworejo Expo 2023 digelar untuk angkat potensi daerah.

Bupati Klaten Buka Rakor Kearsipan

KLATEN (KR) - Bupati Klaten, Sri Mulyani, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan se Jawa Tengah, di salah satu hotel di Klaten, Rabu (15/2). Bupati memberikan apresiasi tinggi pada Dinas Kearsipan Kabupaten Klaten, karena telah memberikan banyak prestasi untuk Kabupaten Klaten. Di antaranya, masuk dalam 10 besar percontohan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), tingkat nasional.

"Banyak prestasi yang diraih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klaten. Kita dorong terus agar seluruh dinas, kecamatan dan desa di Klaten menggunakan Srikandi untuk mempermudah kerjanya," kata Sri Mulyani. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, Syahrana, yang juga Ketua Forum Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se Jawa Tengah, mengemukakan, Rakor diselenggarakan sebagai ajang saling bertukar pikiran, guna mewujudkan tata kelola kearsipan yang lebih baik.

Syahrana menjelaskan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klaten meraih sejumlah prestasi. Diantaranya, berhasil masuk 10 besar kabupaten/kota percontohan aplikasi Srikandi. Dengan aplikasi tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, efisien dan akurat.

Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi Pemerintah RI yang disokong oleh empat instansi utama. Yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, Edy Supriyanta mengajak seluruh dinas di wilayah Jawa Tengah, untuk mengarsipkan datanya secara digital. "Mari seluruh kepala dinas di daerah-daerah untuk mengarsipkan data secara digital. Kita sukseskan program pemerintah, untuk mempermudah tata kelola pemerintahan kita," kata Edy Supriyanta. **(Sit)-f**

tunya di Kabupaten Purworejo, di mana kami bekerjasama memanfaatkan event yang diselenggarakan daerah untuk mempromosikan pariwisata," ucap Direktur Pemasaran BOB Agus Rochiyardi, Kamis (16/2).

Pemkab Purworejo menggelar Purworejo Expo 2023 pada Rabu - Minggu (15-19/2) di kompleks Pendopo Bupati Purworejo. Menurutnya, pameran itu menjadi salah satu event penting dalam pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Purworejo. Dikatakan, BOB di bawah Kemenparkraf mendukung gelaran acara yang masuk dalam wilayah zona koordinatif tersebut.

"Partisipasi BOB pada Purworejo Expo 2023 ini akan menjadi salah satu momentum penting peningkatan citra dan pemilihan ekonomi sektor kepariwisataan di Indonesia. Khususnya di Kawasan Borobudur dan sekitarnya," tegasnya. Eksepsi atau pameran merupakan salah satu ajang yang efektif untuk mempromosikan berbagai potensi wisata lokal serta ekonomi kreatif daerah. "Harapannya kegiatan tersebut akan menyedot pengunjung, tidak hanya dari Purworejo, tapi juga luar daerah, sehingga sasaran promosi akan semakin luas," tuturnya.

Sementara itu, Wakil

Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH mengemukakan, beberapa proyek strategis nasional yang bersinggungan dengan wilayah Purworejo memberikan banyak keuntungan bagi daerah. Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta, Badan Otorita Borobudur, Bendung Bener dan jalan tol Cilacap-Yogyakarta menggeliatkan perekonomian Purworejo."

"Hadirnya megaprojek tersebut tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan terus menggali dan mempromosikan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui Purworejo Expo," terangnya. **(Jas)-f**

Mimbar Legislatif

Masa Reses, Dewan Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah melaksanakan reses masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 20-22/2023. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, reses masa persidangan kedua ini akan fokus menangani soal kemiskinan ekstrem di Jateng. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman saat menerima audiensi pengurus GP Ansor Kecamatan Bonang, Demak, Selasa (14/2), di Ruang Rapat Pimpinan DPRD.

Saat pembukaan Musrenbang 2023, Sukirman juga memberikan penegasan mengenai kondisi kemiskinan di Jateng terutama di daerah-daerah yang masuk wilayah ekstrem. Dewan minta kepada gubernur dan Bupati/Walikota agar melakukan pendataan secara detail kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan validitas data kemiskinan yang terbaru, pemerintah daerah dapat fokus dalam menangani serta mengurangi jumlah warga miskin di daerah masing-masing.

Dewan berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis, dan menjadi kebijakan prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-



KR-Budiono

Sukirman

2026. Dewan minta hal tersebut bisa menjadi kerangka pikir dan perjuangan bersama. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Kabupaten Bogor (17/1), angka kemiskinan ekstrem pada 2024 harus berada pada 0 persen.

Target yang diberikan Presiden tidak mudah. Pada 2022, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 2 persen berada di 14 provinsi. Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, problem kemiskinan ekstrem harus bisa segera tuntas. Perisalah Legislatif Ahli Muda Yohan Fitriadi menyampaikan, reses masa persidangan kedua tahun Sidang 2022/2023 dilaksanakan pada 15-23 Februari 2023. Reses akan dilaksanakan di 13 daerah pemilihan meliputi 35 kabupaten/kota. (*)

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman - Anf)